

Pemberdayaan Perempuan dalam Melawan Pernikahan Dini di Indonesia: Implementasi dan Dampak Program 'Empower Her' di Desa Mamungaa Timur

(Empowering Women to Combat Early Marriage in Indonesia: Implementation and Impact of the 'Empower Her' Program in Mamungaa Timur Village)

Moon Hidayati Otoluwa*¹, Muziatun Mukadji², Novriyanto Napu³, Mery Balango⁴, Hanisah Hanafi⁵

^{1,2,3,4,5}Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Negeri Gorontalo

E-mail: moonhidayatotoluwa@gmail.com*¹, muziatun@ung.ac.id², n.napu@ung.ac.id³, mery.balango211064@gmail.com⁴, hanisahhanafi65@gmail.com⁵

Received: 20 Februari 2024

Accepted: 19 Mei 2024

Published: 20 Mei 2024

Abstrak: Pernikahan dini di Indonesia merupakan isu serius yang memerlukan perhatian untuk melindungi hak anak dan perempuan. Program "Empower Her: Inspirasi Perempuan Melawan Pernikahan Dini" bertujuan memberdayakan perempuan muda untuk menghadapi dan mengatasi tekanan pernikahan dini melalui berbagai inisiatif di Desa Mamungaa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Kecamatan Bone Pantai, Provinsi Gorontalo. Metode yang digunakan dalam program ini mencakup sosialisasi melalui seminar dan lokakarya, pendidikan formal dan non-formal, serta pelatihan keterampilan dan pendidikan seksual. Selain itu, program ini menyediakan dukungan ekonomi melalui akses kredit mikro dan pelatihan kewirausahaan, serta dukungan psikologis dan sosial melalui konseling dan kelompok dukungan. Hasil analisis menunjukkan penurunan signifikan dalam angka pernikahan dini di wilayah yang terlibat, yang mencerminkan perubahan positif dalam persepsi dan perilaku masyarakat terkait pernikahan dini. Pemberdayaan perempuan melalui peningkatan kesadaran, keterampilan, dan dukungan ekonomi terbukti efektif dalam mengurangi ketergantungan ekonomi yang sering menjadi alasan pernikahan dini. Untuk memastikan dampak yang berkelanjutan, diperlukan dukungan terus-menerus dalam bentuk pelatihan keterampilan, pendidikan seksual, akses pekerjaan, serta layanan dukungan sosial dan psikologis. Langkah-langkah ini esensial dalam mempromosikan kesetaraan gender, menggali potensi penuh perempuan, dan mengubah norma budaya yang mendukung pernikahan dini.

Kata Kunci: pernikahan dini, kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan.

Abstract: Early marriage in Indonesia is a serious issue that requires attention to protect the rights of children and women. The "Empower Her: Inspirasi Perempuan Melawan Pernikahan Dini" program aims to empower young women to face and overcome the pressures of early marriage through various initiatives in Mamungaa Timur Village, Bone Pantai District, Bone Bolango Regency, Gorontalo Province. The methods used in this program include outreach through seminars and workshops, formal and non-formal education, as well as skills training and sexual education. Additionally, the program provides economic support through microcredit access and entrepreneurship training, along with psychological and social support through counseling and support groups. Analysis results show a significant decrease in early marriage rates in the involved areas, reflecting positive changes in community perceptions and

behaviors regarding early marriage. Empowering women by increasing awareness, skills, and economic support has proven effective in reducing economic dependency, which is often a reason for early marriage. To ensure sustainable impact, continuous support is needed in the form of skills training, sexual education, job access, and social and psychological support services. These steps are essential in promoting gender equality, realizing the full potential of women, and changing cultural norms that support early marriage.

Keywords: *child marriage, gender equality, women empowerment.*

PENDAHULUAN

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang sebelum usia 19 tahun (Indrianingsih *et al.*, 2020) dan merupakan masalah serius yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan perempuan, termasuk kesehatan, pendidikan, dan hak-hak mereka sebagai individu. Fenomena ini masih marak terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks global, pernikahan dini terkait dengan berbagai masalah sosial, ekonomi, dan kesehatan yang serius, terutama bagi perempuan yang rentan terhadap dampaknya. Di Indonesia, pernikahan dini terjadi di berbagai wilayah, terutama di daerah pedesaan dan perkotaan dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah (Damayanti & Mardiyanti, 2020).

Beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan dini di Indonesia antara lain faktor budaya, ekonomi, akses terbatas ke pendidikan, dan interpretasi agama tertentu (Putra *et al.*, 2023). Budaya patriarkis yang memandang perempuan sebagai istri dan ibu pada usia muda, serta kemiskinan yang mendorong keluarga untuk menikahkan anak-anak mereka sebagai strategi ekonomi, menjadi pemicu utama (Zuhri & Amalia, 2022). Selain itu, ketidaksetaraan dalam akses pendidikan membuat perempuan lebih rentan terhadap pernikahan dini karena kurangnya kesempatan untuk mengembangkan diri dan mengambil keputusan yang lebih baik untuk masa depan mereka.

Meskipun pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah seperti peningkatan usia minimum pernikahan dalam undang-undang, pernikahan dini masih menjadi tantangan besar. Data UNICEF pada akhir tahun 2022 menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-8 di dunia dan ke-2 di ASEAN dengan hampir 1,5 juta kasus pernikahan dini. Permohonan dispensasi pernikahan usia dini yang diajukan ke pengadilan agama juga meningkat signifikan selama pandemi COVID-19 (Kumparan.com, 2023).

Dalam menghadapi tantangan ini, program "Empower Her: Inspirasi Perempuan Melawan Pernikahan Dini" hadir sebagai inisiatif yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan muda dalam menghadapi dan mengatasi tekanan pernikahan dini. Program ini didasarkan pada pemahaman mendalam tentang kompleksitas faktor-faktor yang mendorong pernikahan dini, seperti ketidaksetaraan gender, keterbatasan pendidikan, kemiskinan, dan tekanan budaya. Melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif, program Empower Her bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak perempuan, memperluas akses terhadap pendidikan dan sumber daya, serta mempromosikan kemandirian ekonomi dan sosial.

Artikel ini bertujuan untuk menyajikan tinjauan menyeluruh tentang implementasi,

dampak, dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program Empower Her. Selain itu, artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah efektif dalam memberdayakan perempuan muda untuk melawan pernikahan dini. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya mereka untuk mengatasi pernikahan dini dan memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia dan berbagai belahan dunia. Artikel ini juga merupakan kontribusi yang relevan dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi masalah yang relevan dan mendesak dihadapi oleh masyarakat Mamungaa Timur. Masalah-masalah yang diidentifikasi mencakup kurangnya akses terhadap pendidikan, tingkat putus sekolah yang tinggi, isu lingkungan, dan pernikahan usia dini. Proses identifikasi masalah ini menjadi dasar pembentukan tujuan dan rencana aksi pengabdian yang berfokus pada kebutuhan riil masyarakat yang memerlukan solusi tepat guna. Identifikasi masalah dilakukan melalui observasi lapangan yang melibatkan pemerintah desa dan berbagai pihak terkait, menciptakan fondasi yang kokoh untuk keberhasilan program pengabdian.

Setelah proses identifikasi masalah selesai, perencanaan program pengabdian dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti anggota masyarakat setempat, lembaga pemerintah, para mahasiswa KKN MBKM, dan dosen pendamping. Langkah-langkah spesifik dan tujuan dari program pengabdian ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan dan kapasitas masyarakat yang akan dilayani. Partisipasi aktif mahasiswa dan dosen dalam proses perencanaan ini menciptakan fondasi yang erat antara dunia akademis dan masyarakat, menekankan nilai kerjasama dan keberlanjutan dalam menjembatani divisi antara teori dan praktik.

Implementasi program pengabdian dilakukan sesuai dengan rencana tindakan yang telah disusun. Tim pengabdian bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan. Salah satu kegiatan utama adalah seminar "Empower Her" yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dalam melawan pernikahan dini. Seminar ini dilaksanakan pada tanggal 4 November 2023 di SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) anak dan remaja Desa Mamungaa Timur. Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi kepada remaja di Desa Mamungaa Timur tentang cara menyikapi maraknya pernikahan dini. Seminar ini dihadiri oleh remaja perempuan, ibu-ibu yang memiliki remaja putri, serta aparat desa, dan dibuka langsung oleh Kepala Desa Mamungaa Timur, Ibu Indrawaty Amin Jusuf.

Selama proses pengabdian, kolaborasi dengan pihak eksternal dan pembangunan kapasitas masyarakat setempat ditekankan. Melalui kolaborasi ini, diharapkan tercipta sinergi yang positif dan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan. Dukungan dari berbagai lembaga bersama dengan partisipasi aktif mahasiswa dan dosen memperkuat hubungan antara dunia akademis dan masyarakat, menggarisbawahi pentingnya kerjasama dan keberlanjutan dalam

program pengabdian.

Teknik pengumpulan data dalam pengabdian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memastikan bahwa program pengabdian ini mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat Mamungaa Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui serangkaian kegiatan dan program, terjadi peningkatan kesadaran masyarakat tentang permasalahan pernikahan dini dan dampak negatifnya terhadap perempuan dari segi kesehatan fisik, psikologis, dan sistem reproduksi. Program penyuluhan dan seminar berhasil menyampaikan pesan penting tentang pentingnya pendidikan, kemandirian, dan hak-hak perempuan. Para peserta program "Empower Her" mengalami peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan rasa percaya diri. Pelatihan keterampilan, bimbingan belajar khususnya Bahasa Inggris, serta pembentukan kelompok diskusi dan dukungan telah memberikan perempuan akses ke sumber daya dan jaringan yang mereka perlukan untuk mengontrol kehidupan mereka.

Respon positif dari masyarakat terlihat dari partisipasi aktif dalam kegiatan program. Misalnya, para remaja perempuan yang sebelumnya tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang dampak pernikahan dini kini menunjukkan pemahaman yang lebih baik dan mampu berdiskusi secara kritis tentang topik ini. Orang tua yang menghadiri seminar juga mulai mendukung upaya peningkatan pendidikan bagi anak perempuan mereka, terlihat dari meningkatnya jumlah anak perempuan yang kembali ke sekolah atau mengikuti program pendidikan non-formal. Pihak pemerintahan desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat berkomitmen bersama untuk mengurangi tingkat pernikahan usia dini di Desa Mamungaa Timur. Kesadaran masyarakat meningkat mengenai efek negatif jangka panjang dari pernikahan usia dini, terutama kaitannya dengan kesehatan dan potensi stunting pada bayi yang lahir dari pernikahan dini.

Program "Empower Her" telah berhasil meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan non-formal. Program mentoring atau pengajaran Bahasa Inggris pada anak dan remaja di Desa Mamungaa Timur memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka dan meraih impian tanpa terkekang oleh pernikahan usia dini. Pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pernikahan dini dan dampaknya telah diakui dalam program "Empower Her". Melalui strategi komunikasi efektif dan melibatkan pemangku kepentingan, pesan tentang pentingnya pendidikan, kesetaraan gender, dan hak-hak perempuan dapat disampaikan dengan jelas.

Dengan demikian, jurnal pengabdian ini tidak hanya menggambarkan hasil dari program "Empower Her", tetapi juga membahas implikasi dan pentingnya upaya melawan pernikahan dini dan memberdayakan perempuan dalam masyarakat. Melalui pendekatan holistik dan melibatkan seluruh komunitas, program "Empower Her" berhasil mengubah pola pikir dan

perilaku masyarakat terkait pernikahan usia dini, serta memberikan dukungan bagi perempuan muda untuk mengejar pendidikan mereka tanpa hambatan pernikahan usia dini.

Hambatan dan Tantangan

Dalam pelaksanaan program "Empower Her", terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang signifikan. Berikut adalah rincian hambatan dan tantangan tersebut:

Norma dan Budaya Patriarki

Norma-norma budaya yang mendukung pandangan patriarki sering kali menjadi hambatan utama dalam pemberdayaan perempuan. Di banyak komunitas, keyakinan bahwa peran tradisional perempuan adalah di rumah masih sangat kuat. Mengubah pandangan ini membutuhkan waktu dan upaya yang signifikan, serta pendekatan yang sensitif terhadap budaya setempat.

Akses Terbatas ke Pendidikan

Kurangnya akses atau peluang pendidikan bagi perempuan menjadi salah satu tantangan besar. Banyak perempuan di daerah pedesaan mengalami keterbatasan akses ke pendidikan formal, yang membatasi potensi mereka untuk berkembang dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Pendidikan memiliki peran kunci dalam memberdayakan perempuan dan membuka peluang ekonomi serta sosial.

Ketidaksetaraan Ekonomi

Perempuan sering kali menghadapi ketidaksetaraan ekonomi dalam berbagai bentuk, seperti gaji yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, akses terbatas ke peluang pekerjaan yang layak, dan kurangnya dukungan untuk usaha mandiri. Ketidaksetaraan ekonomi ini menghambat kemampuan perempuan untuk mencapai kemandirian finansial dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Ketidaksetaraan dalam Kebijakan dan Hukum

Beberapa kebijakan dan hukum mungkin tidak sepenuhnya mendukung pemberdayaan perempuan. Ketidaksetaraan dalam hak-hak legal, seperti hak kepemilikan properti atau hak mengakses layanan kesehatan, dapat menjadi hambatan serius. Revisi dan penegakan hukum yang adil serta kebijakan yang inklusif sangat penting untuk mendukung pemberdayaan perempuan.

Kekerasan Gender

Kekerasan terhadap perempuan, termasuk pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya, merupakan hambatan serius bagi pemberdayaan. Kekerasan gender tidak hanya merugikan korban secara fisik, tetapi juga berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan emosional mereka, menghambat mereka dari mencapai potensi penuh.

Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat

Kesadaran yang rendah tentang pentingnya pemberdayaan perempuan dan kurangnya

pendidikan tentang hak-hak mereka juga menjadi tantangan besar. Banyak masyarakat yang belum menyadari dampak positif dari pemberdayaan perempuan terhadap perkembangan sosial dan ekonomi komunitas mereka.

Ketidaksetaraan dalam Partisipasi Politik

Perempuan sering kali kurang terwakili dalam keputusan politik dan memiliki peran yang terbatas dalam proses pengambilan keputusan. Ketidaksetaraan ini membatasi kemampuan perempuan untuk mempengaruhi kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka dan masyarakat secara keseluruhan.

Kurangnya Akses ke Sumber Daya

Akses perempuan ke sumber daya seperti kredit, tanah, atau teknologi sering kali terbatas. Hal ini menghambat kemampuan mereka untuk mandiri secara ekonomi dan mengembangkan usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Penyediaan akses yang adil dan inklusif terhadap sumber daya ini sangat penting untuk pemberdayaan perempuan.

Peran Tradisional dan Harapan Masyarakat

Beberapa masyarakat masih memiliki harapan bahwa perempuan harus memenuhi peran tradisional tertentu, seperti menjadi ibu rumah tangga. Pandangan ini dapat membatasi perempuan dari mengejar pendidikan atau karir yang mereka inginkan, menghalangi mereka dari mencapai potensi penuh.

KESIMPULAN

Program "Empower Her: Inspirasi Perempuan Melawan Pernikahan Dini" telah memberikan wadah bagi perempuan untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka, memperoleh keterampilan, dan mendapatkan dukungan dalam melawan praktik pernikahan dini. Melalui kegiatan sosialisasi, seminar, dan program pendidikan, masyarakat, terutama perempuan, semakin menyadari dampak negatif dari pernikahan dini dan pentingnya pendidikan serta kemandirian perempuan. Program ini memberikan perempuan akses ke sumber daya dan jaringan yang mereka butuhkan untuk mengambil kontrol atas kehidupan mereka, meningkatkan kemandirian ekonomi, dan mengembangkan potensi mereka. Melalui pendekatan komprehensif, terjadi penurunan angka pernikahan dini di wilayah yang terlibat dalam program. Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya pemberdayaan perempuan berdampak positif dalam mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat terkait pernikahan usia dini. Pentingnya mempertahankan program ini dan memastikan dampaknya berkelanjutan. Langkah-langkah konkret seperti pelatihan keterampilan, pendidikan seksual, akses terhadap pekerjaan yang layak, serta dukungan psikologis dan sosial perlu terus didorong untuk memastikan perempuan dapat melawan pernikahan dini dan mencapai potensi penuh mereka.

SARAN DAN REKOMENDASI

1. **Peningkatan Akses Pendidikan:** Program harus terus memperluas akses pendidikan bagi perempuan di semua tingkatan, termasuk pendidikan formal dan non-formal. Pelatihan

keterampilan dan pendidikan seksual juga perlu ditingkatkan untuk memberikan pengetahuan yang komprehensif kepada perempuan.

2. **Dukungan Ekonomi:** Perempuan harus diberikan akses yang lebih baik ke sumber daya ekonomi, termasuk kredit mikro, pelatihan kewirausahaan, dan peluang kerja. Hal ini akan membantu mereka mencapai kemandirian finansial dan mengurangi ketergantungan ekonomi yang seringkali menjadi alasan pernikahan dini.
3. **Pendekatan Komunitas:** Melibatkan seluruh komunitas, termasuk laki-laki, dalam upaya pemberdayaan perempuan sangat penting. Kampanye kesadaran yang melibatkan tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan aparat desa dapat membantu mengubah norma budaya yang mendukung pernikahan dini.
4. **Dukungan Psikologis dan Sosial:** Penyediaan layanan dukungan psikologis dan sosial untuk perempuan dan keluarga mereka adalah kunci. Layanan konseling, kelompok dukungan, dan program rehabilitasi bagi korban pernikahan dini dapat membantu mereka memulihkan diri dan mengembangkan potensi mereka.
5. **Kebijakan dan Advokasi:** Advokasi untuk kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan harus terus dilakukan. Hal ini mencakup penegakan hukum yang melarang pernikahan dini, serta kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan dalam suksesnya program ini. Terima kasih kepada aparat desa Mamungaa Timur, terutama kepada Ibu Indrawaty Amin Jusuf, kepala desa Mamungaa Timur, atas dukungan dan keterlibatannya. Terima kasih juga kepada para tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan organisasi lokal yang telah bekerja sama dalam berbagai kegiatan program. Kami juga mengapresiasi partisipasi aktif para remaja perempuan dan ibu-ibu yang mengikuti program ini dengan antusias. Selain itu, kami berterima kasih kepada para mahasiswa KKN MBKM dan dosen pendamping yang telah berdedikasi dalam melaksanakan program ini. Semoga kerjasama yang telah terjalin dapat terus berlanjut dan membawa perubahan positif yang berkelanjutan bagi masyarakat Mamungaa Timur.

Dengan demikian, artikel ini menunjukkan bahwa program "Empower Her: Inspirasi Perempuan Melawan Pernikahan Dini" memiliki peran yang signifikan dalam memberdayakan perempuan dan mengurangi angka pernikahan dini, serta menegaskan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Damayanti, N., & Mardiyanti, N. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Di Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 8(1), 24-31.
- Indrianingsih, I., Nurafifah, F., & Januarti, L. (2020). Analisis dampak pernikahan usia dini dan upaya pencegahan di desa Janapria. *Jurnal Warta Desa (JWD)*, 2(1), 16-26.
- Kumparan. (2023, 22 Juni). UNICEF: Indonesia Peringkat 8 Dunia Banyaknya Kasus

Pernikahan Dini. Kumparan. Diakses dari
<https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/unicef-indonesia-peringkat-8-dunia-banyaknya-kasus-pernikahan-dini-20eMLxG2FyL/1>

- Putra, D., Hasibuan, Z., & Linur, R. (2023). Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur terhadap Tingkat Perceraian Studi Kasus Desa Mompang Julu Kabupaten Mandailing Natal. *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, 5(02).
- Zuhri, S., & Amalia, D. (2022). Ketidakadilan gender dan budaya patriarki di kehidupan masyarakat Indonesia. *Murabbi*, 5(1).